



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BNN PROVINSI NTB TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, BNNP Nusa Tenggara Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke BNN RI dan diteruskan kepada Presiden RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNNP Nusa Tenggara Barat melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah berpedoman pada rencana strategis lembaga sebagai penjabaran visi dan misi organisasi.

Secara umum Sasaran Strategis BNNP Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan, telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Namun demikian juga masih terdapat target kinerja yang belum mencapai hasil secara optimal, tentunya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan BNNP Nusa Tenggara Barat dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan; serta dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN di masa mendatang.

Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua Amin.

**Mataram, 20 Januari 2022**

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Gagas Nugraha, SH, S.I.K, MM, MH**

# **RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BNNP NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021**

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNNP Nusa Tenggara Barat melaksanakan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.
2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Realiasi target kinerja kedua program tersebut diimplementasikan melalui 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan, dengan kriteria capaian sebagai berikut:

- a. Capaian di atas 100% sebanyak = 7 Indikator Kinerja Kegiatan;
- b. Capaian 90 s/d 100% sebanyak = 9 Indikator Kinerja Kegiatan;
- c. Capaian 80 s/d 89% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- d. Capaian 70 s/d 79% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- e. Capaian 60 s/d 69% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- f. Capaian 50 sd 59% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- g. Capaian dibawah 50% sebanyak = 1 Indikator Kinerja Kegiatan.

Gambaran capaian strategis BNNP Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi target 2 kabupaten/kota tercapai sebesar 3 kabupaten/kota (150%).
  - b. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi target 3 kabupaten/kota tercapai sebesar 4 kabupaten/kota (133%).

- c. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi target 4 kabupaten/kota tercapai sebesar 4 kabupaten/kota (100%).
  - d. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" target 1 Kawasan tercapai sebesar 1 Kawasan (100%).
  - e. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi target 2.7 tercapai sebesar 2.85 (106%)
2. Bidang Rehabilitasi dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
- a. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih target 25 orang tercapai sebesar 49 orang (196%).
  - b. Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis target 10 orang tercapai sebesar 3 orang (30%).
  - c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi target 5 lembaga tercapai sebesar 5 lembaga (100%).
  - d. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi target 5 unit tercapai sebesar 14 unit (280%).
  - e. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat target 3.2 tercapai sebesar 3.277 (100%).
3. Bidang Pemberantasan dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
- a. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 target 10 Berkas P-21 tercapai sebesar 29 Berkas P-21 (290%).
  - b. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan target 100 tercapai sebesar 100 (100%).
  - c. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba target 100 tercapai sebesar 100 (100%).
4. Bagian Umum dengan 4 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
- a. Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat target 90 tercapai sebesar 90.87 (100%).

- b. Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target 4 BNN kabupaten/kota tercapai sebesar 4 BNN kabupaten/kota (100%).
- c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat target 94 tercapai sebesar 99.09 (105%)
- d. Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 4 BNN kabupaten/kota tercapai sebesar 4 BNN kabupaten/kota (100%).

Upaya pencapaian target kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat, dilakukan dengan mendorong kinerja Satuan Kerja (Satker) melalui pembinaan teknis operasional yang berdampak pada semakin berfungsinya sistem kinerja yang dibangun serta peningkatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi dan semakin timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Berdasarkan evaluasi bahwa kinerja Satker setiap tahunnya sudah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun dibalik peningkatan kinerja tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan saat ini terutama bidang pemberantasan. Sampai saat ini bidang pemberantasan di beberapa Satker di kewilayahan belum terisi baik struktural maupun fungsional.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala keterbatasan tersebut diatas dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di BNNP Nusa Tenggara Barat serta melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dan juga dengan Polda/ Polres setempat untuk bantuan personil guna mendukung kebutuhan organisasi, bila masih belum mencukupi akan dilakukan penambahan personil tenaga yang dipekerjakan.

Pagu anggaran BNNP Nusa Tenggara Barat beserta BNNK jajarannya tahun 2021 sebesar Rp. **14.933.144.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **14.705.731.208,-** persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar **98.48%**.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.....	2
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sistematika.....	5
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA BNN</b> .....	<b>10</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran .....	54
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
<b>Lampiran    1    Perjanjian Kinerja BNNP NTB Tahun Anggaran 2021</b> .....	<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi.

Strategi yang dilakukan oleh BNNP Nusa Tenggara Barat dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkoba melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, serta Pemberantasan. Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Alternatif dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat dan Pascarehabilitasi, Pemberantasan melalui pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Pelaksanaan Operasi Bersinar, serta Laporan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, BNNP Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berkewajiban melaporkan kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

## **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan**

### **1. Kedudukan**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **2. Tugas**

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- e. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

## **3. Fungsi**

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota);
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP;
- f. Pelayanan administrasi BNNP.

## **4. Kewenangan**

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN Provinsi NTB berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

#### D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat : Gagas Nugraha, SH,  
S.I.K,MM,MH
2. Kepala Bagian Umum : M. Ridwan, S.A.P
3. Kepala Bidang Pemberantasan : Drs. I Made Ardana, MM
  - Kasi Intelijen : -
  - Kasi Wastahti : Anang Thoha Mislahudin, S.Ag
4. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

#### STRUKTUR ORGANISASI BNNP NUSA TENGGARA BARAT



## **E. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I     Pendahuluan

Bab II    Perencanaan Kinerja

Bab III   Akuntabilitas Kinerja

Bab IV    Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh pada RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Untuk mewujudkannya BNN memiliki sasaran strategis antara lain:

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

BNNP Nusa Tenggara Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024.

Renstra BNN tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2021 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2021.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran strategis (outcome), indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan. Begitu juga dengan BNNP Nusa Tenggara Barat, ada perjanjian antara pimpinan satker yakni Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat dengan pimpinan tertinggi BNN yakni Kepala BNN.

Adapun Perjanjian Kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**Kementerian/Lembaga : BNNP Nusa Tenggara Barat**

**Tahun Anggaran : 2021**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.7
5	Meningkatnya kapasitas	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Orang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	5 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	-
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
	hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	90
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	94
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara *cascading* turun hingga ke level bawah di BNN Kabupaten/Kota di jajarannya.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) indikator. Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan **7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan melebihi target, 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan sesuai target, dan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan tidak tercapai.**

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 11 (sebelas) sasaran strategis tahun 2021 dan penjelasan hasil capaian 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	CAPAIAN (%)
1	2	3	4		
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota	150%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga	3 Kabupaten/Kota	4 Kabupaten/Kota	133%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	CAPAIAN (%)
1	2	3	4		
	pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi			
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota	4 Kabupaten/Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.7	2.85	106%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Orang	49 Orang	196%
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	3 Orang	30%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis	5 Unit	14 Unit	280%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	CAPAIAN (%)
1	2	3	4		
		Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi			
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,2	3.277	100%
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	-		
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas	29 Berkas	290%
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-		
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100%
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	CAPAIAN (%)
1	2	3	4		
	dan prekursor narkoba				
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	90	90.87	100%
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota	4 BNN Kabupaten/ Kota	100%
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	94	99.09	105%
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota	4 BNN Kabupaten/ Kota	100%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2 Kab. /Kota	3 Kab. /Kota	150%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori “Tinggi” dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :
  - b.1 **Self Regulation** : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
  - b.2 **Assertiveness** : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
  - b.3 **Reaching Out** : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

- c. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

<b>Klasifikasi</b>	<b>Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba</b>
Sangat rendah	$\leq 45.97$
Rendah	45.98 – 49.73
Tinggi	49.74 – 53.50
Sangat tinggi	$\geq 53.51$

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 3 kabupaten/kota atau sebesar 150%

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” (skala nilai 49,74-53,50) di wilayah provinsi	50	46,69
2	BNNK MATARAM			50	51,97
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			50	50,84
4	BNN KAB SUMBAWA			50	52,31
5	BNN KAB BIMA			50	46,52
<b>TOTAL</b>				<b>2 Kab/Kota berkategori "Tinggi"</b>	<b>3 Kab/Kota berkategori "Tinggi"</b>

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. kegiatan pengembangan soft skill pada remaja di SMP/SMU sederajat dan pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika dilakukan secara masif dan berkesinambungan sehingga indeks ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di provinsi NTB masuk dalam kategori tinggi;
2. terbangunnya kesadaran di lingkungan pendidikan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam

pelaksanaan program dan anggaran dana sekolah seperti sosialisasi bahaya narkoba saat masa orientasi sekolah pada siswa baru;

3. terjalinnya hubungan baik melalui koordinasi intens yang dilakukan oleh BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota dengan institusi/lembaga pemerintah, swasta, komponen masyarakat, maupun lingkungan pendidikan.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	$= (\sum RIK / \sum TIK) * 100\%$	$= (3/2) * 100\% = 150\%$	- $\sum RIK$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Diri - $\sum TIK$ = Jumlah Target Indeks Ketahanan Diri

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. pertanyaan kuisisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja yang terkadang sulit dipahami oleh beberapa siswa;
2. pandemi covid-19 menjadikan kegiatan sedikit terhambat karena adanya pembatasan sosial;
3. masih ada beberapa institusi/ lembaga yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan P4GN;
4. kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. pertanyaan kuisisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja untuk kedepannya bisa dibuat lebih simpel, jelas, dan mudah dipahami;
2. menjalin kerja sama yang baik lagi dengan semua komponen baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan dalam upaya meningkatkan ketahanan diri remaja dari penyalahgunaan narkoba;
3. koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi-instansi terkait.

<b>2.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/ Kota	4 Kabupaten/ Kota	133%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal di suatu kabupaten/kota.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi;

- b. kriteria indeks ketahanan keluarga berkategori “Tinggi” dengan melakukan perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure). Setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2021;
- c. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :
- c.1 kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
- c.2 kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
- c.3 kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60
- c.4 kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 4 kabupaten/kota atau sebesar 133%

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” (skala nilai 76,61-88,30) di wilayah provinsi	78,67	76,61
2	BNNK MATARAM			78,67	97,05
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			78,67	82,32
4	BNN KAB SUMBAWA			78,67	80,18
5	BNN KAB BIMA			78,67	82,59
<b>TOTAL</b>				<b>3 Kab/Kota berkategori “Tinggi”</b>	<b>4 Kab/Kota berkategori “Tinggi”</b>

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. adanya dukungan dari unsur perangkat desa terhadap pelaksanaan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa yang dilakukan oleh BNNP dan BNN Kabupaten/Kota di wilayah NTB;

2. antusiasme orang tua murid dari kegiatan dialog interaktif keluarga sangat kuat dengan mendampingi anaknya pada kegiatan berlangsung dan mendukung program P4GN.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (4/3) * 100\%$ $= 133\%$	- $\sum \text{RIK}$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga - $\sum \text{TIK}$ = Jumlah Target Indeks Ketahanan Keluarga

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih lemahnya koordinasi antar perangkat desa dalam penerapan program ketahanan keluarga dilingkungannya

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah mengenali faktor pelindung dan risiko penyalahgunaan narkoba dalam keluarga dapat melalui pengenalan karakter dan minat anggota keluarga khususnya anak, memperhatikan pola asuh dalam keluarga, mengetahui harapan keluarga, serta tata nilai dalam keluarga.

<b>3.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	4 Kabupaten/ kota	4 Kabupaten/ kota	100%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :
  - a.1. **SDM**; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
  - a.2. **Metode**; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
  - a.3. **Anggaran**; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
  - a.4. **Material**; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.

**a.5. Sistem (Kebijakan);** adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.

**a.6. Aktivitas;** adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

- b. dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :
- b.1 IKP 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
  - b.2 IKP 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
  - b.3 IKP 2,51 – 3,25 : Mandiri
  - b.4 IKP 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri
- c. kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 4 kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dapat terealisasi sebanyak 4 kabupaten/kota atau sebesar 100%

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” (skala nilai 2,51-3,25) di wilayah provinsi	3,51	3,53
2	BNNK MATARAM			3,41	3,64
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			3,40	3,40
4	BNN KAB SUMBAWA			3,42	3,42
5	BNN KAB BIMA			3,40	3,40
<b>TOTAL</b>				<b>4 Kab/Kota berkategori “Mandiri”</b>	<b>4 Kab/Kota berkategori “Mandiri”</b>

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. semakin tumbuhnya kepedulian, kesadaran masyarakat, dan memandang bahwa permasalahan Narkoba menjadi persoalan bersama yang harus segera diatasi;
2. partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN.
3. Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN

Formula yang digunakan untuk meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN pada indikator kinerja kegiatan “jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (4/4) * 100\%$ $= 100\%$	- $\sum \text{RIK}$ = Jumlah Realisasi kab/kota yang mandiri - $\sum \text{TIK}$ = Jumlah Target kab/kota yang mandiri

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. beberapa kabupaten/kota masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan;
2. kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan penanganan penyalahguna narkoba di berbagai instansi/ lingkungan;
2. akan dilakukan Koordinasi/Komunikasi dan kerjasama yang lebih intensif bagi lingkungan dalam melaksanakan kegiatan P4GN;
3. terus melakukan sinergi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait.

<b>4.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%

Definisi operasional dari jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" adalah suatu kawasan/wilayah yang masyarakat didalamnya mempunyai potensi menjadi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pengedar narkoba, yang dengan kesadarannya mengikuti program pemberdayaan alternatif guna mengurangi dampak buruk terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Metode pengukuran jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" dengan kriteria yaitu :

- a. kawasan/wilayah yang masyarakat didalamnya mempunyai potensi menjadi penyalahguna, korban penyalah guna dan pengedar narkoba karena faktor lingkungan, faktor individu dan faktor ketersediaan narkoba;
- b. kawasan/wilayah rawan yang telah ditentukan, mendapatkan program pembinaan alternatif berupa pelatihan life skill yang diberikan oleh BNNP Nusa Tenggara Barat dengan tujuan agar mantan pengguna dan pengedar dapat memperoleh kesempatan memiliki usaha yang halal dan tidak terjerumus lagi ke dalam narkoba.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" dapat terealisasi sebanyak 1 kawasan atau sebesar 100%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan
2	BNNK MATARAM				
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT				
4	BNN KAB SUMBAWA				
5	BNN KAB BIMA				
<b>TOTAL</b>				<b>1 Kawasan</b>	<b>1 Kawasan</b>

Kawasan rawan narkoba yang dibina BNN Provinsi NTB melalui program pemberdayaan alternatif berada di kelurahan Pancor kecamatan Selong kabupaten Lombok Timur. BNN Provinsi NTB memberikan bantuan paket usaha Sop Buah kepada para pemuda yang masih belum memiliki pekerjaan. Diharapkan melalui program pemberdayaan alternative tersebut dapat menjauhkan para pemuda di kelurahan Pancor untuk menjauhi pengaruh buruk dari narkoba karena salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba adalah kondisi lingkungan yang kurang baik, masalah ekonomi, angka putus sekolah yang tinggi, dan minimnya lapangan kerja.

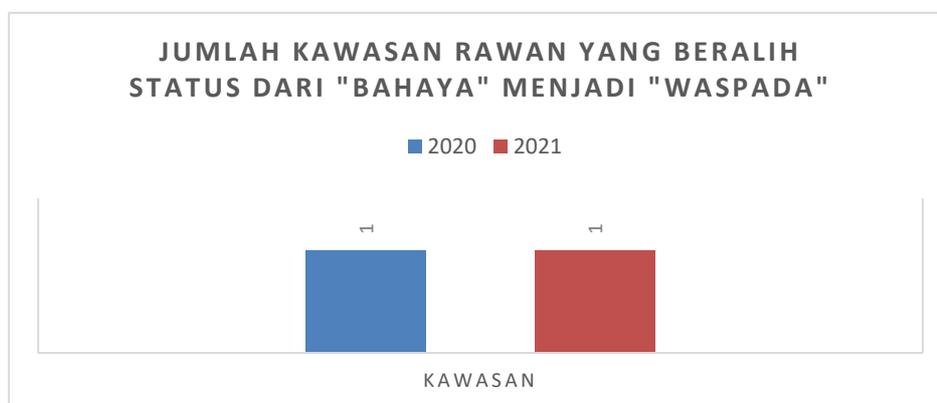


Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya dukungan dari unsur perangkat lingkungan, dinas perindustrian, maupun masyarakat sendiri yang telah jenuh dan bosan dengan image negatif mengenai kawasan atau lingkungannya yang dicap sebagai kawasan/wilayah rawan narkoba.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan pada indikator kinerja kegiatan "jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada", adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	$= (\sum \text{RKW} / \sum \text{TKW}) * 100\%$	$= (1/1) * 100\%$ $= 100\%$	- $\sum$ RKW = Jumlah Realisasi kawasan - $\sum$ TKW = Jumlah Target kawasan

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 secara jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" tidak mengalami penurunan maupun peningkatan capaian pada tahun 2021 yaitu tetap 1 kawasan rawan narkoba



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah keterbatasan anggaran dan tidak tersedianya anggaran tindak lanjut dari program pemberdayaan alternatif melalui pelatihan life skill, sehingga panitia tidak bisa melakukan program pasca pelatihan yang berguna untuk pendampingan lebih lanjut.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah dalam perencanaan program selanjutnya perlu adanya identifikasi awal atau membaca hasil laporan kegiatan sebelumnya, agar dapat merencanakan tindak lanjut program yang mestinya dilaksanakan berkesinambungan berikut dengan kebutuhan anggaran yang memadai demi kelancaran program di tahun berikutnya.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.7	2.85	106%

Definisi operasional dari nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi adalah suatu alat ukur untuk mengukur sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran. Dalam konsep nilai keterpulihan kawasan rawan ini yang diukur, antara lain: (1)pelaksanaan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan duniausaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat (orsosmas),dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.

Metode pengukuran nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi dengan kriteria yaitu :

#### a. Pengukuran Awal

Pengukuran Awal dilaksanakan pada Saat Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Narkoba (Februari 2021) di Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur, Subjek yang dimengisi Kuisisioner adalah Stakeholder terkait Lurah Pancor, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Perwakilan Peserta dan Kesbangpol Kab. Lotim, dengan hasil sebagai berikut :

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KONVERSI JAWABAN					Keterangan	No	Nama Responden	IKKR	Keterangan
			RESP 1	RESP 2	RESP 3	RESP 4	RESP 5					
1.	INDIKATOR POKOK KERAWANAN NARKOBA	BANDAR NARKOBA (8)	24	24	24	16	24		1	Budi Ansari	2.92	
2.		PRODUKSI NARKOBA (7)	21	21	21	14	21		2	Ardiansyah	2.92	
3.		ENTRY POINT NARKOBA (6)	18	18	18	12	18		3	Haris	2.85	
4.		KURIRNARKOBA (5)	15	15	15	15	15		4	Andy	2.62	
5.		PECANDU NARKOBA (4)	12	12	8	12	12		5	Agus Salim	2.92	
6.		KASUS NARKOBA (3)	9	9	9	6	9			Total	14.24	
7.		BARANG BUKTI NARKOBA (2)	4	4	4	4	4			Nilai	2.85	
8.		KEJAHATAN UMUM (1)	2	2	2	2	2			Kategori	B	
9.	INDIKATOR PENDUKUNG	TEMPAT HIBURAN (5)	5	5	5	5	5			Kriteria Pulih	Siaga	
10.		ANGKAKEMISKINAN (4)	4	4	4	4	4					
11.		KOS-KOSAN (3)	3	3	3	3	3					
12.		SARANA PUBLIK (2)	4	4	4	4	4					
13.		INTERAKSI SOSIAL (1)	2	2	2	2	2					

14.	TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM	HASIL YANG DIRASAKAN MASY (7)	24	24	24	24	24
15.		KEBERLANJUTAN PROGRAM (6)	24	24	24	24	24
16.		PELAKSANA PROGRAM (5)	20	20	20	20	20
17.		PELAKSANAAN PROGRAM (4)	16	16	16	16	16
18.		SINERGI INSTANSI PEMERINTAH (3)	12	12	12	12	12
19.		KEMITRAAN DUNIA USAHA (2)	8	8	8	8	8
20.		DAMPAK KEBERDAYAAN MASY (1)	4	4	4	4	4
		JUMLAH TOTAL (N = 1)	231	231	225	207	231
<b>INDEKS KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN</b>			2.92	2.92	2.85	2.62	2.92
Total			14.24				
Nilai			2.85				
Kategori			B				
Kriteria Pulih			<b>Siaga</b>				

## b. Pengukuran Kedua

Pengukuran Kedua dilaksanakan pada Awal Desember 2021 Setelah pelaksanaan Bimtek Lifeskill "Mele Sop Buah" kawasan Rawan di Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur, Subjek yang dimengisi Kuisisioner adalah Lurah Pancor, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Perwakilan Peserta dan Kesbangpol, dengan hasil sebagai berikut :

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KONVERSI JAWABAN					Keterangan
			RESP 1	RESP 2	RESP 3	RESP 4	RESP 5	
1.	INDIKATOR POKOK KERAJAAN NARKOBA	BANDAR NARKOBA (8)	24	24	24	24	24	
2.		PRODUKSI NARKOBA (7)	21	21	21	21	14	
3.		ENTRY POINT NARKOBA (6)	12	18	12	12	12	
4.		KURIR NARKOBA (5)	15	15	15	15	15	
5.		PECANDU NARKOBA (4)	8	8	8	8	8	
6.		KASUS NARKOBA (3)	9	9	9	9	9	
7.		BARANG BUKTI NARKOBA (2)	4	4	4	4	4	
8.		KEJAHATAN UMUM (1)	2	2	2	2	2	
9.	INDIKATOR PENDUKUNG	TEMPAT HIBURAN (5)	5	5	5	5	5	
10.		ANGKAKEMISKINAN (4)	4	4	4	4	4	
11.		KOS-KOSAN (3)	3	3	3	3	3	
12.		SARANA PUBLIK (2)	4	4	4	4	4	
13.	INTERAKSI SOSIAL (1)	2	2	2	2	2		
14.	TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM	HASIL YANG DIRASAKAN MASY (7)	28	28	28	28	28	
15.		KEBERLANJUTAN PROGRAM (6)	24	24	24	24	24	
16.		PELAKSANA PROGRAM (5)	20	20	20	20	20	
17.		PELAKSANAAN PROGRAM (4)	16	16	16	16	16	
18.		SINERGI INSTANSI PEMERINTAH (3)	12	12	12	12	12	
19.		KEMITRAAN DUNIA USAHA (2)	8	8	8	8	8	
20.		DAMPAK KEBERDAYAAN MASY (1)	4	4	4	4	4	
		JUMLAH TOTAL (N = 1)	225	231	225	225	218	
<b>INDEKS KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN</b>			2.85	2.92	2.85	2.85	2.76	
Total			14.23					
Nilai			2.85					
Kategori			C					
Kriteria Pulih			<b>Siaga</b>					

**Kesimpulan :**

Dengan demikian nilai IKKR hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKKR setelah dikonversi = **2,85 (C)**
- Nilai Interval (posisi nilai IKKR) = **antara 2,51-3,25**
- Nilai interval Konversi dikalikan 25 = **2,85 x 25 = 71,25**
- Kategori IKKR = **C**
- Kriteria Keterpulihan **Siaga**

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja terkait nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi sebesar 2.7 dapat terealisasi sebesar 2.85 atau sebesar 106%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,7	2,85
2	BNNK MATARAM				
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT				
4	BNN KAB SUMBAWA				
5	BNN KAB BIMA				
<b>TOTAL</b>				<b>2,7</b>	<b>2,85</b>

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya dukungan dari unsur perangkat lingkungan, dinas perindustrian, maupun masyarakat sendiri yang telah jenuh dan bosan dengan image negatif mengenai kawasan atau lingkungannya yang dicap sebagai kawasan/wilayah rawan narkoba.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan pada indikator kinerja kegiatan "jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada", adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi	$=(\sum \text{RKW} / \sum \text{TKW}) * 100\%$	$=(2.85/2.7) * 100\%$ $=106\%$	- $\sum$ RKW = Jumlah Realisasi Nilai Keterpulihan - $\sum$ TKW = Jumlah Target Nilai Keterpulihan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah beberapa instansi/ lingkungan masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. memperkuat sinergi program dengan instansi/lembaga/organisasi terkait;
2. dengan Adanya Inpres 2 tahun 2020 diharapkan setiap stakeholder mampu membuat program berbasis anti Narkoba diwilayahnya masing-masing.

**5. Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi**

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Orang	49 Orang	196%

Definisi operasional dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 25 orang jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dapat terealisasi sebanyak 49 Orang atau sebesar 196%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	10 Orang
2	BNNK MATARAM			5 Orang	10 Orang
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			5 Orang	10 Orang
4	BNN KAB SUMBAWA			5 Orang	9 Orang
5	BNN KAB BIMA			5 Orang	10 Orang
<b>TOTAL</b>				<b>25 Orang</b>	<b>49 Orang</b>

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. dukungan dari perangkat desa dalam layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat diwilayahnya;
2. ada beberapa desa yang memasukkan anggaran P4GN dalam kegiatan APBDes dalam mendukung program rehabilitasi diwilayahnya.

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$= (\sum \text{RIP} / \sum \text{TIP}) * 100\%$	$= (49/25) * 100\%$ $= 196\%$	- $\sum \text{RIP}$ = Jumlah Realisasi petugas - $\sum \text{TIP}$ = Jumlah Target petugas

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. ada beberapa desa yang tidak aktif dalam melaksanakan layanan Rehabilitasi IBM (belum ada klien yang melaporkan diri untuk mengikuti program rehabilitasi);
2. beberapa petugas yang sudah dilatih BNNP maupun BNNK dalam prakteknya masih belum memiliki keterampilan yang memadai dalam melaksanakan layanan rehabilitasi.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya jika terdapat keluarga atau kerabatnya yang memiliki ketergantungan narkoba;
2. melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi setelah melaksanakan pelatihan kepada petugas IBM supaya keterlampiran dalam melaksanakan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat dapat diterapkan dengan baik.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	3 Orang	30%

Definisi operasional dari petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah petugas pelaksana layanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan tersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial).

Metode pengukuran jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkoba dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi narkoba dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 10 orang jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dapat terealisasi sebanyak 3 orang atau sebesar 30%

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	3 Orang
2	BNNK MATARAM				
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT				
4	BNN KAB SUMBAWA				
5	BNN KAB BIMA				
<b>TOTAL</b>				<b>10 Orang</b>	<b>3 Orang</b>

Faktor penyebab kegagalan pencapaian target adalah seleksi terhadap peserta yang akan mengikuti uji kompetensi teknis kurang maksimal sehingga banyak peserta yang tidak lulus saat ujian dilaksanakan.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	$= (\sum RKM / \sum TKM) * 100\%$	$= (3/10) * 100\%$ $= 30\%$	- $\sum RKM$ = Jumlah Realisasi petugas yang tersertifikasi - $\sum TKM$ = Jumlah Target petugas yang tersertifikasi

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagian besar petugas yang diuji kompetensi teknisnya tidak siap mental dalam menghadapi pertanyaan dari asesor.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah dengan memaksimalkan proses seleksi untuk uji kompetensi teknis sehingga diharapkan peserta yang mengikuti ujian tersebut dapat lulus dengan baik.

6.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
----	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5 Lembaga	5 Lembaga	100%

Definisi operasional dari lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Metode pengukuran jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 5 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 5 lembaga atau sebesar 100%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5 Lembaga	5 Lembaga
2	BNNK MATARAM				
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT				
4	BNN KAB SUMBAWA				
5	BNN KAB BIMA				
<b>TOTAL</b>				<b>5 Lembaga</b>	<b>5 Lembaga</b>

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah koordinasi dilakukan secara masif baik melalui media video call, whatsapp, email maupun pembinaan secara langsung kepada seluruh fasilitas layanan rehabilitasi di wilayah NTB sehingga pada akhirnya seluruh lembaga rehabilitasi di wilayah provinsi NTB memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	$= (\frac{\sum RN}{\sum TN}) * 100\%$	$= (5/5) * 100\%$ $= 100\%$	- $\sum RN$ = Jumlah Realisasi Lembaga Rehabilitasi SPM - $\sum TN$ = Jumlah Target Lembaga Rehabilitasi SPM

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah jarak tempuh lembaga rehabilitasi di wilayah NTB rata-rata sangat jauh sehingga waktu pelaksanaan pembinaan maupun koordinasi menjadi kurang maksimal.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah dengan meningkatkan advokasi, koordinasi, serta pembinaan kepada lembaga rehabilitasi di wilayah NTB agar memenuhi standar pelayanan maksimal terkait upaya rehabilitasi kepada pecandu narkoba.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	5 Unit	14 Unit	280%

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 5 unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 14 unit atau sebesar 280%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	1 Unit	3 Unit
2	BNNK MATARAM			1 Unit	3 Unit
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			1 Unit	1 Unit
4	BNN KAB SUMBAWA			1 Unit	1 Unit
5	BNN KAB BIMA			1 Unit	6 Unit
<b>TOTAL</b>				<b>5 Unit</b>	<b>14 Unit</b>

Satker Pembina	Nama IBM	Desa/ Kelurahan
BNNP NTB	Darmasari	Desa Darmasari
	IBM Kel. Pancor	Kel. Pancor
	IBM Taman Ayu	Desa Taman Ayu
BNN Kab. Bima	IBM Desa Tonggondoa	Desa Tonggondoa
	IBM Kel. Dara	Kel. Dara
	IBM Kel. Monggonao	Kel. Monggonao
	IBM Desa Nisa	Desa Nisa
	IBM Tanjung	Kel. Tanjung
	IBM Rabadompu Barat	Kel. Rabadompu Barat
BNN Kota Mataram	Bintaro Bravo	Kel. Bintaro
	Tohpati	Kel. Cakranegara Utara
	Shiva Gati (Lingk. Gedur)	Kel. Abian Tubuh Baru
BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Sapugara Bree	Desa Sapugara Bree
BNN Kab. Sumbawa	IBM Desa Labuhan Burung	Desa Labuhan Burung

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya kerjasama yang baik lintas program maupun lintas sektor terutama peran pemerintah daerah (kelurahan).

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika pada indikator kinerja kegiatan “jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
2.	jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi	$=(\sum RN / \sum TN) * 100\%$	$=(14/5) * 100\%$ $=280\%$	$-\sum RN =$ Jumlah Realisasi penyelenggara

	Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi			layanan rehabilitasi IBM - $\sum$ TN = Jumlah Target penyelenggara layanan rehabilitasi IBM
--	--	--	--	--

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. beberapa petugas IBM yang sudah terlatih masih berasumsi bahwa tugasnya dapat mengancam diri dan keluarganya ketika melaksanakan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, ancaman tersebut berasal dari pengedar diwilayahnya;
2. masih kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan Operasional IBM.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah agar setiap BNNP maupun BNNK dapat menanamkan pemahaman bahwa dalam melaksanakan proses pemulihan kepada klien merupakan tugas mulia serta memberikan jaminan keamanan kepada petugas agen pemulihan di setiap desa dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas IBM.

<b>7.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.2	3.277	100%

Definisi operasional dari indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3.2 untuk nilai indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terealisasi sebesar 3.277 atau sebesar 100%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.2	3.277
<b>TOTAL</b>				<b>3.2</b>	<b>3.277</b>

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah korelasi terhadap sasaran strategis Deputi Bidang Rehabilitasi adalah dengan dicapainya layanan rehabilitasi yang sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional, maka klien dapat menerima layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya terkait masalah ketergantungan narkotika. Sehingga program rehabilitasi yang dilaksanakan Klinik Pratama BNN Provinsi NTB memberikan hasil penanganan pemulihan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dirasakan manfaatnya oleh klien pada khususnya dan keluarga pada umumnya.

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	$=(\sum RIK / \sum TIK) * 100\%$	$=(3.2/3.2) * 100\%$ $=100\%$	- $\sum$ RIK = Jumlah Realisasi Indeks Kepuasan - $\sum$ TIK = Jumlah Target Indeks Kepuasan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. beberapa klien masih bingung dalam mengisi kuesioner indeks kepuasan layanan rehabilitasi;
2. masih kurangnya SDM dibidang upaya rehabilitasi baik secara kualitas dan kuantitas serta kurangnya sarana dan prasarana di bidang rehabilitasi.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. peningkatan kompetensi kepada petugas layanan rehabilitasi dan petugas penunjang layanan rehabilitasi secara menyeluruh sesuai kompetensinya di Klinik Pratama BNNP NTB;
2. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP NTB;
3. meningkatkan sosialisasi mengenai sasaran kegiatan dan indikator kinerja / survey kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNNP NTB.

<b>9.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas P-21	29 Berkas P-21	290%

Definisi operasional dari jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah jumlah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Metode pengukuran jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah

interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 10 jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dapat terealisasi sebanyak 29 berkas P-21 atau sebesar 290%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan P21	10 Berkas P21	29 Berkas P21
<b>TOTAL</b>				<b>10 Berkas P21</b>	<b>29 Berkas P21</b>

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target adalah :

1. kerjasama dan koordinasi yang baik antara BNNP NTB dan BNN RI dalam pengungkapan tindak pidana narkotika;
2. terdapat 11 berkas perkara di tahun 2020 yang P-21 pada tahun anggaran 2021 sehingga pencapaian outcome melebihi target yang telah ditetapkan.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21”, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	$= (\sum RP21 / \sum TP21) * 100\%$	$= (29/10) * 100\%$ $= 290\%$	- $\sum RP21$ = Jumlah Realisasi berkas yang P21 - $\sum TP21$ = Jumlah Target berkas yang P21

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 secara jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 menunjukkan terjadi peningkatan sebanyak 17 berkas P-21, yaitu dari 12 berkas P-21 pada tahun 2020 menjadi 29 berkas P-21 pada tahun 2021.

Perbandingan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. uji lab harus disertai permintaan keterangan ahli (Berita Acara Pemeriksaan Ahli) yang telah melakukan uji narkotika tersebut sehingga membutuhkan biaya perjalanan dinas lebih;
2. pada saat melakukan penangkapan atau RPE tidak ditemukan barang bukti narkotika, mengingat barang bukti narkotika adalah suatu hal yang wajib dalam penanganan narkotika.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. meningkatkan koordinasi dan kerja sama mengenai proses P-21 dengan pihak terkait seperti Polda Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan, Kemenkumham, dan pihak terkait lainnya;
2. menggunakan teknologi penyadapan di BNN RI;
3. menambah jumlah personil anggota Polri di Bidang Pemberantasan bekerjasama dengan Polda dan BNN RI.

<b>10.</b>	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika
------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%

Definisi operasional dari nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah nilai dari kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Metode pengukuran nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dengan kriteria yaitu :

- a. mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNNP Nusa Tenggara Barat;

Rumus penghitungan indikator kinerja adalah:

a = jumlah tahanan yang kabur

b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 100.

Maka:

$$\text{Indikator kinerja} = \left( \frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right) \times 100$$

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 100 untuk nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dapat terealisasi sebesar 100 atau sebesar 100%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	100

Faktor pendukung keberhasilan target adalah :

1. petugas jaga tahanan telah dilatih dan diarahkan dengan baik sehingga tidak ada tahanan yang kabur atau meninggal akibat kelalaian petugas;
2. adanya tenaga kesehatan yang secara rutin memeriksa kesehatan tahanan.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika pada indikator kinerja kegiatan “Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	$= \left( \frac{\sum RN}{\sum TN} \right) * 100\%$	$= (100/100) * 100\% = 100\%$	- $\sum RN$ = Jumlah Realisasi Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan - $\sum TN$ = Jumlah Target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 secara nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan menunjukkan terjadi kesamaan nilai capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu 100.

Perbandingan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah kurangnya petugas jaga tahanan.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah penambahan personil jaga tahanan.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100%

Definisi operasional dari nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika adalah nilai dari kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non-narkotika.

Metode pengukuran nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika dengan kriteria yaitu :

- a. membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahterimakan untuk tahap penuntutan (tahap II).

Rumus penghitungan indikator kinerja adalah:

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika tidak terdapat perbedaan jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai  $a = 1$ , jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka  $a = 0$

$a_1$  = untuk barang bukti 1

$a_2$  = untuk barang bukti 2, dst..

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100

Maka:

$$\text{Indikator kinerja} = \left( \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right) \times 100$$

Dengan  $y$  = jumlah BA (penitipan), dengan asumsi: jumlah BA penitipan = jumlah BA pengeluaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 100 untuk nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika dapat terealisasi sebesar 100 atau sebesar 100%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. petugas memiliki ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika;
2. barang bukti narkotika rata-rata habis untuk uji laboratorium, adapun sisanya dilimpahkan ke penuntut umum.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	$= (\sum RN / \sum TN) * 100\%$	$= (100/100) * 100\%$ $= 100\%$	- $\sum RN$ = Jumlah Realisasi Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba - $\sum TN$ = Jumlah Target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 secara nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan menunjukkan terjadi kesamaan nilai capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu 100. Perbandingan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah terbatasnya sarana dan prasarana terkait tempat penyimpanan barang bukti.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

<b>12.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi NTB	90	90.87	100%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNN Provinsi NTB adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNN Provinsi NTB diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 90 untuk nilai kinerja anggaran BNN Provinsi NTB dapat terealisasi sebesar 90.87 atau sebesar 100%.



Nilai Kinerja Anggaran BNNP Nusa Tenggara Barat melebihi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN, disebabkan adanya upaya perbaikan kinerja dari seluruh Satker dan telah memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan kinerja.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi NTB”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi NTB	$=(\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$=(90.87/90) * 100\%$ $=100\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai Kinerja Anggaran  - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai Kinerja Anggaran

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNNP Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan Program P4GN dengan baik selama tahun 2021.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

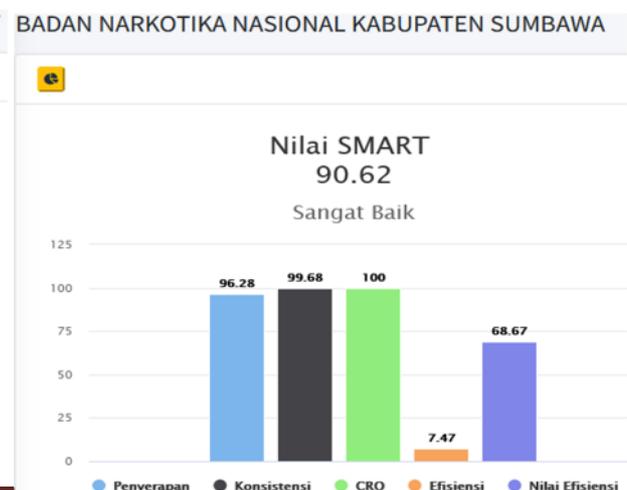
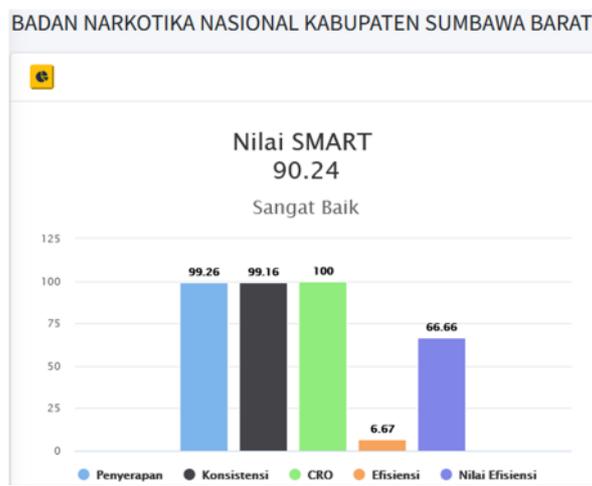
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota	100%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi NTB yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 90.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 4 BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mencapai nilai 90 dapat terealisasi sebesar 4 BNN Kab/Kota (mendapatkan nilai 90) atau sebesar 100%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	90	90.87
2	BNNK MATARAM			90	90.96
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			90	90.24
4	BNN KAB SUMBAWA			90	90.62
5	BNN KAB BIMA			90	90.05
<b>TOTAL</b>				<b>90</b>	<b>90.55</b>



Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	$= (\sum RNB / \sum TNB) * 100\%$	$= (4/4) * 100\%$ $= 100\%$	- $\sum RNB$ = Jumlah Realisasi BNN Kab/Kota yang mencapai target  - $\sum TNB$ = Jumlah Target BNN Kab/Kota yang mencapai target

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNNP Nusa Tenggara Barat dan BNN Kab/Kota di Jajaran NTB telah melaksanakan Program P4GN dengan baik selama tahun 2021.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<b>13.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
------------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	94	99.09	105%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang

terintegrasi pada Online Monitoring (OM ) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 94 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terealisasi sebesar 99.09 atau sebesar 105%.



## Nilai IKPA 99.09



Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara	$= (\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$= (99.09/94) * 100\%$ $= 105\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai IKPA - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai IKPA

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNNP Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dengan baik selama tahun 2021.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota	100%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi NTB yang memiliki nilai IKPA sebesar 94.

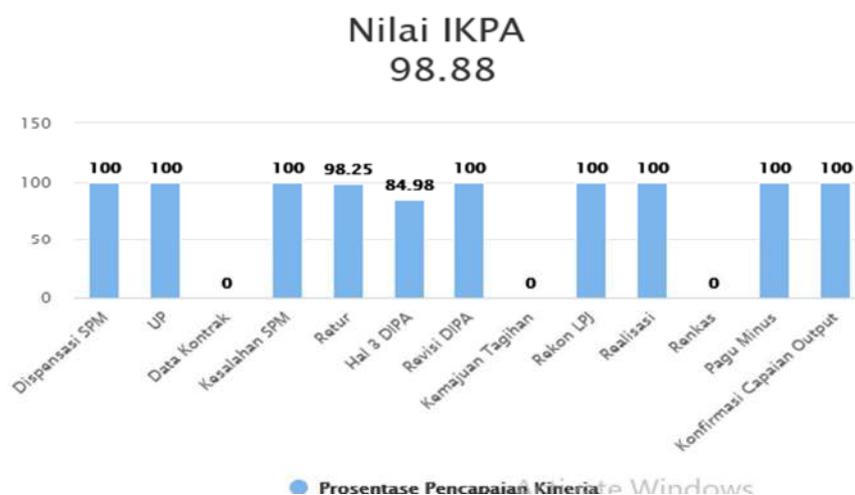
Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 4 BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai 94 dapat terealisasi sebesar 4 BNN Kab/Kota atau sebesar 100%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN	94	99.09
2	BNNK MATARAM			94	98.63
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			94	98.74
4	BNN KAB SUMBAWA			94	98.99
5	BNN KAB BIMA			94	96.59
<b>TOTAL</b>				<b>90</b>	<b>98.41</b>

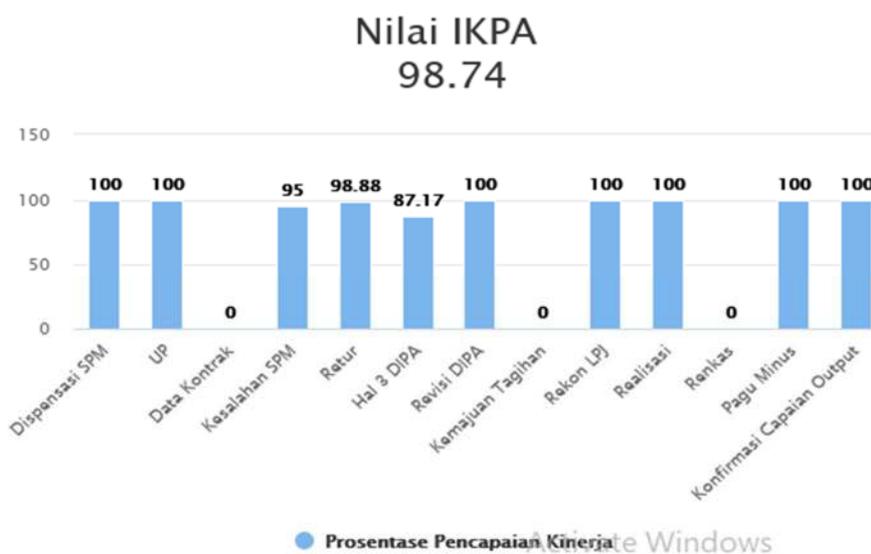
Nilai IKPA BNNK Mataram (98.63)



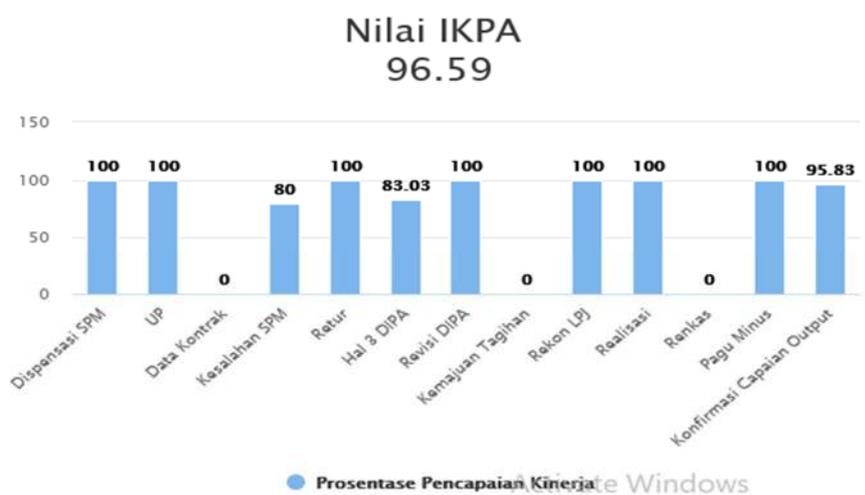
**Nilai IKPA BNNK Sumbawa (98.88)**



**Nilai IKPA BNNK Sumbawa Barat (98.74)**



**Nilai IKPA BNNK Bima (96.59)**



Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	$=(\sum RTB / \sum TTB) * 100\%$	$=(4/4) * 100\%$ $=100\%$	- $\sum RTB$ = Jumlah Realisasi BNN Kab/Kota mencapai target  - $\sum TTB$ = Jumlah Target BNN Kab/Kota mencapai target

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNNP Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dengan baik selama tahun 2021.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Realisasi Anggaran

Tahun 2021 BNNP Nusa Tenggara Barat beserta BNNK jajarannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.933.144.000,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	10,137,990,000	10,055,894,190	99.19	82,095,810	0.81
2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	4,795,154,000	4,649,837,018	96.97	145,316,982	3.03
<b>TOTAL</b>		<b>14,933,144,000</b>	<b>14,705,731,208</b>	<b>98.48</b>	<b>227,412,792</b>	<b>1.52</b>

Adapun rincian realisasi anggaran per-satker di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SATKER	PAGU DANA	REALISASI	%	SISA DANA	%
1	BNNP NTB	8,432,642,000	8,281,095,899	98.20	151,546,101	1.80
2	BNN KOTA MATARAM	1,527,903,000	1,526,695,500	99.92	1,207,500	0.08
3	BNN KAB. SUMBAWA BARAT	1,642,160,000	1,629,969,531	99.26	12,190,469	0.74
4	BNN KAB. SUMBAWA	1,628,615,000	1,568,014,233	96.28	60,600,767	3.72
5	BNN KAB. BIMA	1,701,824,000	1,699,956,045	99.89	1,867,955	0.11
<b>TOTAL</b>		<b>14,933,144,000</b>	<b>14,705,731,208</b>	<b>98.48</b>	<b>227,412,792</b>	<b>1.52</b>

Anggaran BNNP Nusa Tenggara Barat beserta BNNK jajarannya Tahun 2021 dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu:

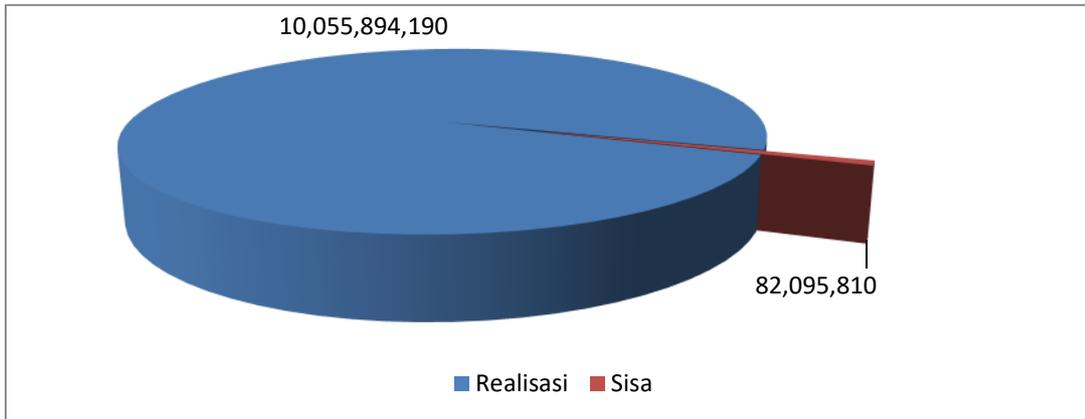
**1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN, dengan pagu sebesar Rp. 10.137.990.000,-**

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 10.137.990.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 10.055.894.190,- (99.19%), sisa anggaran sebesar Rp. 82.095.810,- (0.81%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat alokasi pembayaran gaji pegawai serta uang makan yang dibayar sesuai dengan kehadiran masuk kerja setiap pegawai. Pengawasan yang ketat terhadap kehadiran pegawai sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan untuk mendukung capaian organisasi.

Penyebab lain tidak terserapnya anggaran disebabkan adanya sisa dari kegiatan layanan perkantoran serta pengeluaran kegiatan yang dilakukan se-efisien mungkin.

**Grafik 1. Realiasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya**

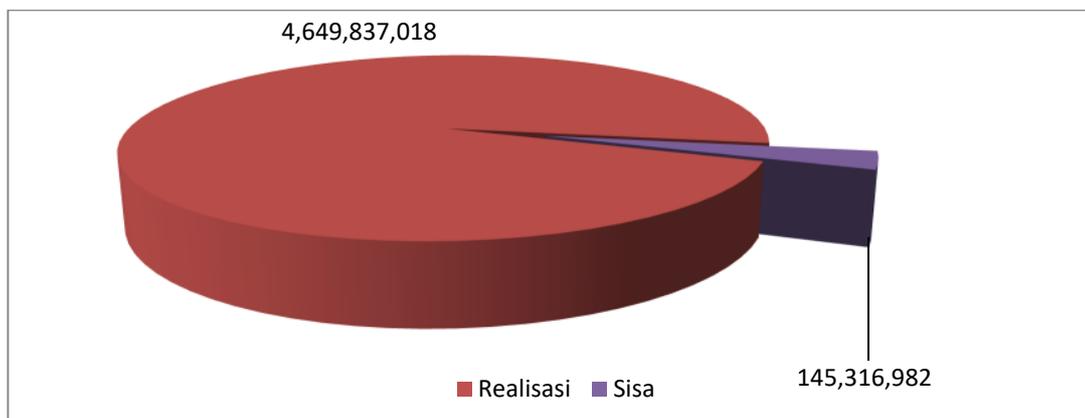


**2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan pagu sebesar Rp. 4.795.154.000,-**

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 4.795.154.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 4.649.837.018,- (96.97%), sisa anggaran sebesar Rp. 145.316.982,- (3.03%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat disebabkan adanya sisa dari kegiatan di P2M, Pemberantasan, dan Rehabilitasi yang sudah terlaksana tetapi terdapat sisa anggaran. Hal tersebut seperti sisa anggaran perjalanan dinas, ATK, dan paket meeting. Sisa anggaran juga terdapat pada layanan PNBPN terhadap penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) yang tidak mencapai target.

**Grafik 2. Realiasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Nusa Tenggara Barat beserta BNNK diujarannya sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Nusa Tenggara Barat telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar BNNP Nusa Tenggara Barat yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi 3) Bidang Pemberantasan serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNNP Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat beserta BNNK diujarannya pada tahun 2021 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan, ada 11 sasaran dan 17 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat.

## 2. Pengukuran Kinerja Outcome

Gambaran pencapaian IKK BNNP Nusa Tenggara Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Urutan	Jumlah IKK	Rentang Capaian	%
I.	7	Capaian $\geq$ 100%	41%
II.	9	$85\% \leq$ Capaian $<$ 100%	53%
III.	0	$70\% \leq$ Capaian $<$ 85%	0%
IV.	1	Capaian $<$ 70%	6%
V.	0	NA ( <i>Not Available</i> )	0%

## 3. Pengukuran Kinerja Anggaran

Pencapaian kinerja anggaran BNNP Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021 setelah dilakukan rekonsiliasi dan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 214/PMK.02/2017 adalah sebesar 90.87 dengan kriteria “Sangat Baik”.

## 4. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

- a. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas.
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- c. Meningkatkan kualitas SDM pegawai baik di BNNP maupun BNNK melalui pelatihan-pelatihan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
- d. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
- e. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis *web base* yang sudah ada mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (BNN Kendali, Sistem Informasi Narkotika, SIRENA BNN dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (*e-monev* dan *e-ikip*) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

## LAMPIRAN I : DOK. PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si  
**Jabatan** : Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

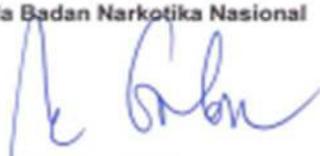
**Nama** : Dr. Petrus R. Golose  
**Jabatan** : Kepala Badan Narkotika Nasional

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 24 Maret 2021

Pihak Kedua, Kepala Badan Narkotika Nasional	Pihak Pertama, Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat
	
Dr. Petrus R. Golose	Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,7
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5 Lembaga

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	5 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	-
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-
12	Meningkatnya proses	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	94
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	556.787.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	259.053.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	1.232.452.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	94.594.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	244.205.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	800.357.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	49.250.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp	100.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	750.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	338.790.000
11. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp	-

12. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	3.370.910.000
13. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tataaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	67.532.000
14. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	139.675.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	5.143.892.000
16. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	117.968.000

Bogor, 24 Maret 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Narkotika Nasional

Dr. Petrus R. Golose

Pihak Pertama,  
Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si